

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

LKJiP BPKHTL

WILAYAH XVIII BANDA ACEH



Banda Aceh,
JANUARI 2024

2023

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh sebagai wujud pelaksanaan Renstra yang berisikan sasaran kegiatan dalam memenuhi sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Satker BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh yang berfokus kepada pencapaian kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tujuan organisasi.

Berakhirnya pelaksanaan DIPA kegiatan tahun 2023, satker BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh sebagai penanggungjawab kegiatan telah melaksanakan kegiatan yang teruraikan pada Renstra satker BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020 - 2024 periode tahun ketiga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Renstra satker BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh merupakan hasil penjabaran dari renstra unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024.

LKjIP dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini diucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



Banda Aceh, Januari 2024

Kepala Balai,

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.

NIP. 19721004 200003 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Permasalahan yang sedang Dihadapi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategi BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020 – 2024	7
B. Rencana Kerja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	11
C. Rencana Kerja dan Anggaran BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	12
D. Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	18
E. Review atas Dokumen Perencanaan BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Metode Pengukuran Kinerja	21
a. Pengukuran Kinerja Sasaran	21
b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja	22
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	22
a. Capaian Kinerja Sasaran	22
b. Efektifitas Capaian Kinerja	24
c. Efisiensi Capaian Kinerja	26
d. Progres Capaian Kinerja terhadap Target Renstra	28
e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
1. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	31

2. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan	32
3. Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA dan Dukungan Manajemen TORA	34
4. Penataan Batas Kawasan Hutan Reguler	35
5. Terlaksananya Inventarisasi Hutan Nasional	36
6. Penafsiran Citra Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional	38
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	41
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Tabel Volume target kegiatan pemantapan kawasan hutan pada Renstra BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh 2020 – 2024 s/d target renstra tahun ke – 4	9
2.	Tabel Terget kegiatan pemantapan kawasan hutan pada Renja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023	11
3.	Tabel Histori Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023	13
4.	Tabel Rincian Rencana Kerja dan Anggaran serta Penanggung Jawab kegiatan pada Setiap Pejabat Pembuat komitmen BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	14
5.	Tabel Perjanjian Kinerja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023	18
6.	Tabel Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	23
7.	Tabel Pengukuran Efektifitas Capaian Kinerja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	25
8.	Tabel Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	26
9.	Tabel Progres Capaian Renstra BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	28
10.	Tabel Capaian dari kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	30
11.	Tabel Analisis Komponen Kegiatan Fasilitas Kegiatan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	32
12.	Tabel Analisis Komponen Kegiatan Fasilitas Kegiatan Dampak Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023 ..	33
13.	Tabel Analisis Komponen Kegiatan Dokumentasi Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	34
14.	Tabel Analisis Komponen Kegiatan Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	35
15.	Tabel daftar Enumerasi TSP/PSP Tahun 2023	37

16. Tabel Analisis Komponen Kegiatan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023	38
17. Tabel Realisasi Serapan Anggaran BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023	42

DAFTAR GAMBAR

Nomor	<u>Judul</u>	Halaman
1.	Gambar Bagan Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh	4
2.	Diagram Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis kelamin s/d Bulan Desember 2023	5

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Judul</u>	Halaman
1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	L1



Kegiatan Pengembangan SDM Untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan harapan dari semua pihak. Sebagai salah satu inti pokok dari pengaturan dimaksud adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya.

Prinsip *good governance* sebagaimana yang dicita-citakan terdiri dari transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh institusi, harus didasarkan pada keterbukaan dalam mengungkapkan berbagai informasi material, termasuk hal-hal yang relevan dilakukan oleh institusi yang bersangkutan dalam proses pengambilan kebijakan. Prinsip partisipasi disini maksudnya bahwa dalam melakukan aktifitasnya, setiap institusi harus mengikut sertakan peran aktif dari semua komponen yang berkaitan. Sedangkan prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dari setiap komponen dalam institusi yang bersangkutan, termasuk dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatannya, sehingga manajemen Institusi dimaksud dapat terlaksana dengan efektif.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 975 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

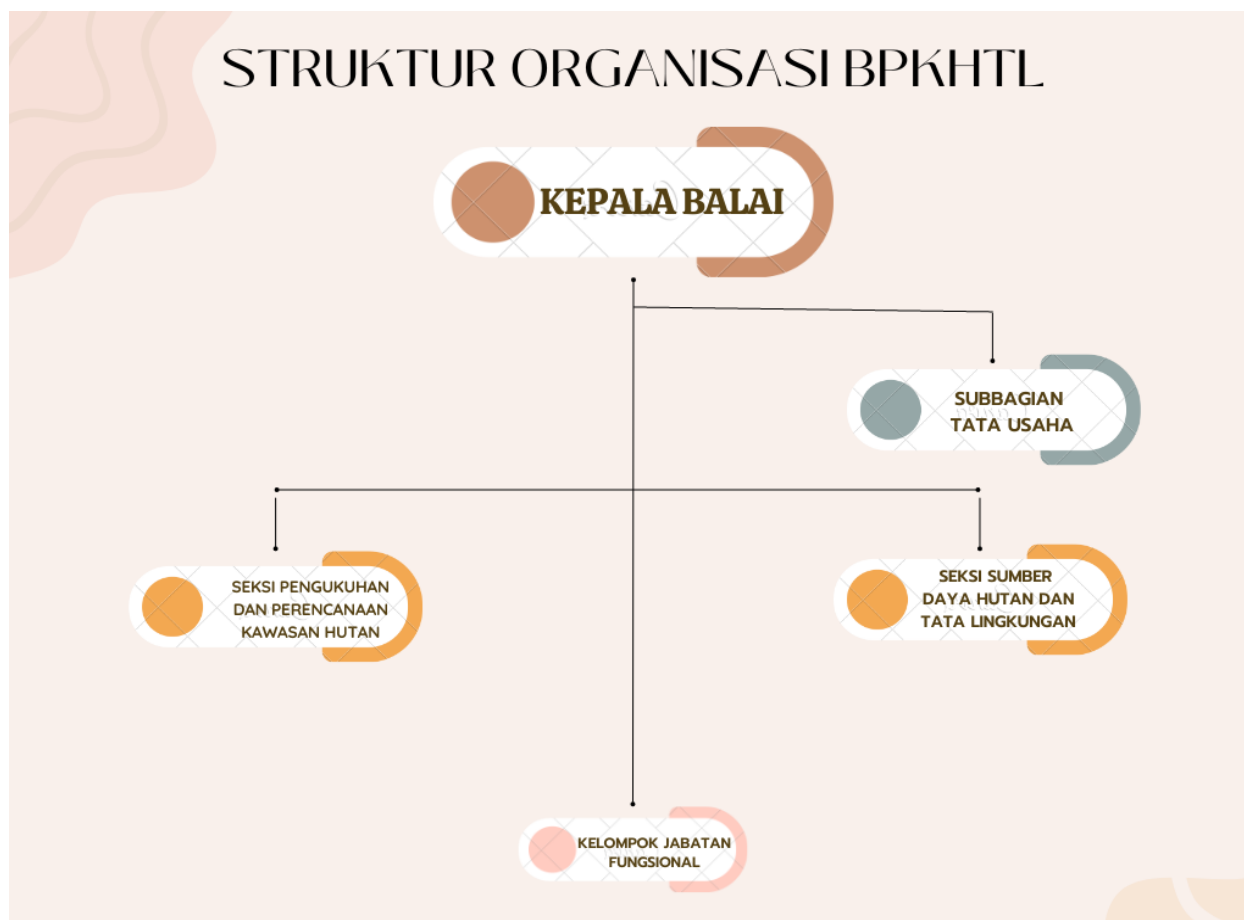
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan
4. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
5. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;

7. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
9. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
11. Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
12. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah;
13. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi;

Sedangkan struktur organisasi BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.

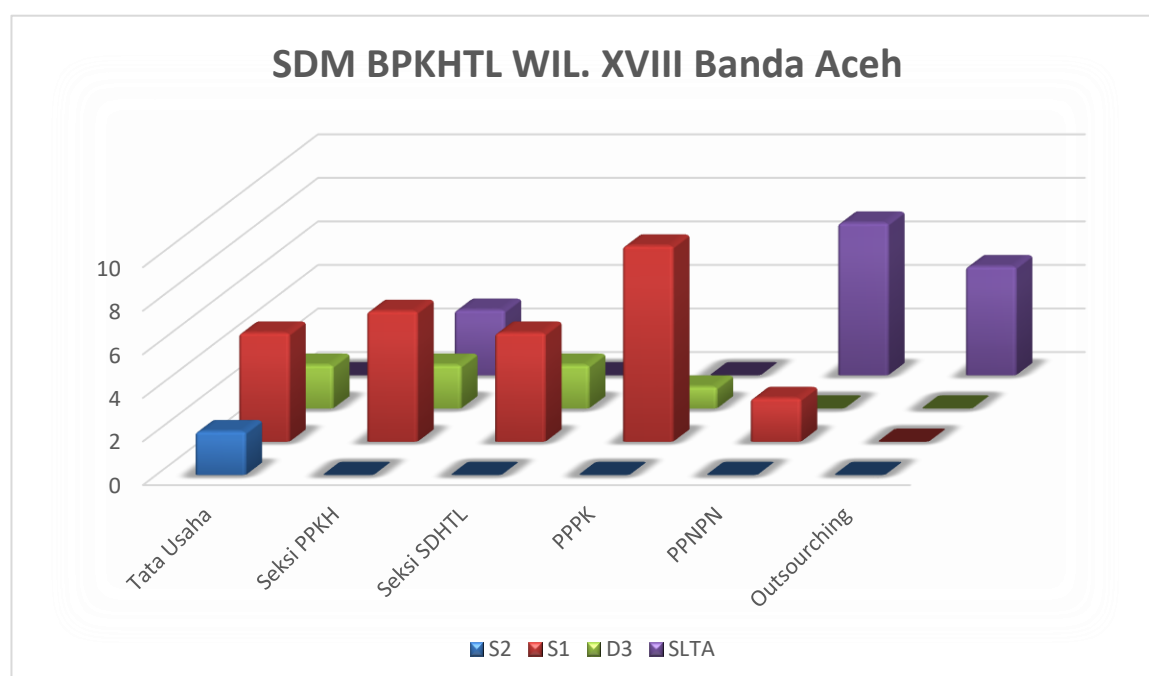
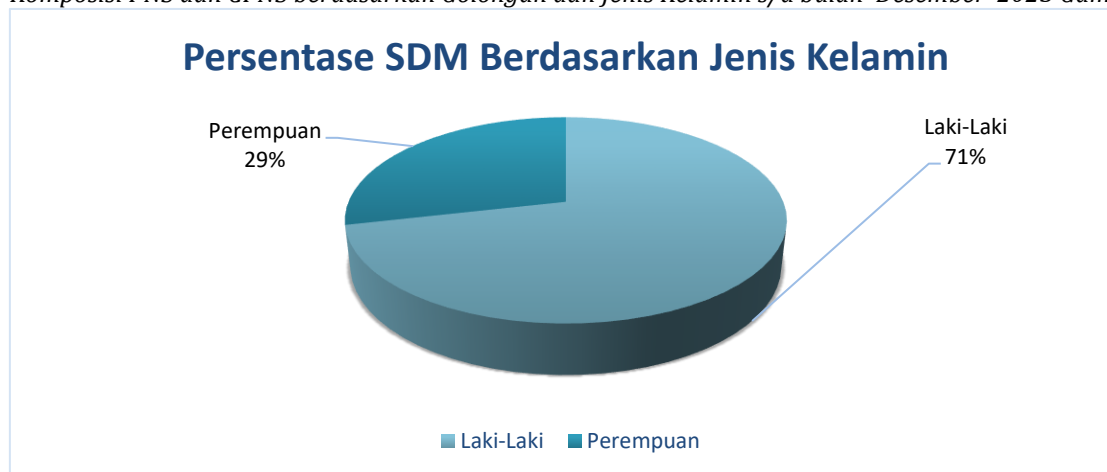


Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL XVIII Banda Aceh
(lampiran Permen. LHK No.P.18/2022)

C. Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai sasaran kegiatan penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui pemantapan kawasan hutan, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 51 orang yang terdiri dari 14 Wanita dan 35 Pria, Bagian Tata Usaha Sebanyak 9 Org, Bagian Seksi PPKH sebanyak 11 Org, Bagian Seksi SDHTL sebanyak 7 Org, PPPK sebanyak 10 Orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 orang dan Tenaga Outsourcing sebanyak 5 orang. Keseluruhan pegawai BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan seperti tersaji pada Tabel 1 berikut ini:

Komposisi PNS dan CPNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin s/d bulan Desember 2023 Gamba2



D. Permasalahan yang sedang Dihadapi

BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh memiliki peran strategis mewujudkan prakondisi penyiapan pemantapan kawasan hutan dalam rangka mendukung tata kelola hutan di Provinsi Aceh melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan jumlah sumber daya manusia dan anggaran yang memadai serta mendapat dukungan dari *stakeholder* yang tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Aceh, diharapkan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari serta terjaminnya kualitas

lingkungan hidup, sehingga dapat mewujudkan pembangunan di bidang kehutanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018, Luas kawasan hutan dan konservasi perairan di Aceh adalah seluas 3.550.390,23 Ha yang tersebar di 23 Kota/Kabupaten. Dengan kondisi tersebut tentu saja muncul berbagai macam kendala dan tantangan yang menjadi permasalahan bagi BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang batas kawasan hutan serta pentingnya menjaga kawasan hutan. Sehingga masih sering ditemui pembukaan lahan baru di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Dan juga dampak dari kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap Kawasan hutan adaah sering terjadi penelokasm Masyarakat saat pelaksanaan kegiatan lapangan. Selain itu juga terdapat kendala lain diantaranya kebijakan penganggaran yang berubah-ubah yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh berjalan kurang maksimal.



Kegiatan Studi Banding dalam rangka Penyelenggaraan ZI (Zona Integritas)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020-2024

BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Kota Banda Aceh dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Aceh. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sasaran unit kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2020-2024 adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan.

Rencana Strategis (Renstra) BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020-2024 akan memberi “Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk TORA melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penataan kawasan hutan, dengan rincian kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) seluas 50.729 Ha.
2. Menyelesaikan tata batas kawasan hutan (reguler) sepanjang 3.124,46 Km dan kawasan hutan konservasi perairan sepanjang 326,51 Km berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.580/MENLHK/SEKJEN/2/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

865/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.

3. Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui verifikasi PNBK penggunaan kawasan hutan sebanyak 5 unit Wajib Bayar.
4. Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XXII sebanyak 1 dokumen.
5. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah XXII sebanyak 3 layanan.
6. Inventarisasi sumberdaya hutan melalui pembangunan kluster Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi PSP sebanyak 29 kluster.
7. Tersedianya data dan informasi tutupan hutan.
8. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan BPKHTL Wilayah XXII sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal
9. Sepanjang Tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah XVII Banda Aceh melaksanakan kegiatan yang mendukung program Ditjen PKTL, yaitu bidang planologi dan tata lingkungan. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari sasaran program Direktorat Jenderal PKTL dan sasaran strategis KLHK. Tabel 1 menunjukkan keterkaitan sasaran dan indikator DPKTL, serta sasaran strategis dan indikator strategis KLHK

Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan pada renstra BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh 2020-2024, telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung capaian indikator kinerja kegiatan pada renstra sebagaimana tersaji pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 1. Volume target kegiatan pemantapan kawasan hutan pada renstra BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh 2020-2024 sampai dengan target renstra tahun ke empat

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Kompenen Kegiatan BPKHTL Wilayah XVIII	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Kualitas Lingkungan Hidup									
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan									
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	-	-	1	1	1	3
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen	-	-	1	1	1	3
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan									
Terselesaikanya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah di selesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah diselesaikan	Km	27,04	747	1.588	2.207		
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi , verifikasi dan BATBobyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Dokumen hasil inventarisasi , verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	Provinsi (17 Kabupaten)	4	1	2	3	7	17

Kegiatan Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan									
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan : Enumerasi Klaster TSP/PSP dan Re-Enumerasi Klaster PSP	Klaster	9	3	5	6	6	29
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Laporan	1	1	1	1	1	5
Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan									
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Pada Ditjen PKTL	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5

B. Rencana Kerja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Upaya pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Renja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023 didukung melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
2. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
3. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan sebanyak 1 rekomendasi.
4. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan sebanyak 1 rekomendasi.
5. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
6. Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 2 Layanan

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian Sasaran Kegiatan pada Renja 2023 BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dapat disajikan sebagaimana Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 2. Target kegiatan pemantapan kawasan hutan pada Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	2	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	2	2	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	134	134	Unit
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	51	51	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	83	83	Unit

C. Rencana Kerja dan Anggaran BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Dalam mendukung program bidang keplanologian dan tata lingkungan tahun 2023, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh telah menyusun Rencana Kerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 sebagai acuan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh telah merencanakan kegiatan dan target kegiatan Tahun 2023 sesuai anggaran yang

tersedia sebesar Rp.36.434.144.000,- (tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-029.06.2.065132/2023 tanggal 30 November 2022. Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan kronologis sebagai berikut :

Tabel 3. Histori Revisi DIPA Tahun Anggaran 2023 BPKHTL Wil. XVIII B. Aceh

NO.	REVISI	PAGU	TANGGAL REVISI	KETERANGAN
1	DIPA AWAL	36.434.144.000	30-11-2022	-
2	DIPA REVISI KE 1	36.434.144.000	23-12-2022	Pemblokiran belanja pegawai yang bersumber dari tunjangan kinerja gaji pokok CPNS/PPPK
3	DIPA REVISI KE 2	51.460.844.000	07-02-2023	Penambahan anggaran PNPB sebesar Rp. 15.026.700.000,- untuk kegiatan Dukungan Penyelesaian TORA, Re-Enumerasi Klaster, Verifikasi PNPB PKH, Dukungan Manajemen
4	DIPA REVISI KE 3	51.460.844.000	28-02-2023	Penghapusan tanda blokir kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan
5	DIPA REVISI KE 4	49.350.904.000	17-07-2023	Penghematan anggaran melalui cutt off blokir belanja barang pada kegiatan teknis sebesar Rp. 2.109.940.000
6	DIPA REVISI KE 5	48.615.668.000	31-08-2023	Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja barang operasional perkantoran sebesar Rp. 735.236.000
7	DIPA REVISI KE 6	47.293.668.000	27-09-2023	Penghematan anggaran melalui cutt off blokir belanja barang pada kegiatan teknis sebesar Rp. 1.322.000.000
8	DIPA REVISI KE 7	35.607.288.000	17-10-2023	Penghematan anggaran melalui cutt off blokir belanja barang pada kegiatan teknis sebesar Rp. 11.686.380.000

9	DIPA REVISI KE 8	35.647.904.000	30-10-2023	Penambahan Pegu anggaran pada belanja Pegawai sebesar Rp. 40.616.000
10	DIPA REVISI KE 9	35.726.840.000	28-11-2023	Pergeseran antar belanja pegawai menjadi belanja barang untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran
11	DIPA REVISI KE 10	35.726.840.000	01-12-2023	Revisi Halaman III DIPA

Adapun rincian rencana kerja dan anggaran serta Penanggung jawab kegiatan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran serta Penanggung jawab kegiatan pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Bagian Tata Usaha			
No.	Kegiatan	Volume	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Layanan Umum • Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi • Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan • Pengelolaan kepegawaian • Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan • Pembangunan sistem manajemen mutu ISO 9001;2015 • Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM • Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 37001;2016	1 Layanan	948.900.000
2.	Layanan Perkantoran • Gaji dan Tunjangan ▪ Pembayaran Gaji dan Tunjangan • Operasional dan Pemeliharaan Kantor ▪ Operasional Perkantoran ▪ Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instanti (SAI) ▪ Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Layanan	4.555.446.000

3.	Layanan Sarana Internal • Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi ▪ Pengadaan Peralatan Teknis • Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran ▪ Pengadaan Peralatan Non Teknis	134 Unit	1.607.800.000
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKH) Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan			
1.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan • Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA - Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif(Lokasi Penggunungan) di Kabupaten Aceh Tengah Sepanjang 331 Km - Bimbingan dan Pengawasan Kegiatan Swakelola Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif di 1 Kabupaten - Dukungan Manajemen Kegiatan TORA - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Pidie, Aceh Jaya, dan Bireuen	1.0 Rekomendasi Kebijakan	2.006.000.000
2.	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan • Penataan batas kawasan hutan (reguler) - Pembahasan Trayek Batas (5 Kab/Kota) - Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Sementara (Lokasi Pengunungan) 7 Kabupaten/Kota sepanjang 571 Km Swakelola - Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif sepanjang 680 Km (Batas Luar 571 Km dan Batas Fungsi 109 Km) (Lokasi Pengunungan) 7 Kabupaten Swakelola - Bimbingan dan Pengawasan Kegiatan Swakelola Pengukuran dan	1.0 Rekomendasi Kebijakan	26.115.864.000

	Pemasangan Tanda Batas Definitif di 7 Kabupaten - Dukungan Manajemen Kegiatan PKH - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pembahasan Trayek Penataan Batas Kawasan Hutan Sepanjang 1.979 Km di Provinsi Aceh - ABT SBPA 2023 - Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak - Hak Pihak Ketiga dalam Kawasan Hutan Sepanjang 826 Km di Provinsi Aceh - ABT SBPA 2023 - Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 1.979 km (Definitif) di Provinsi Aceh - ABT PNBPKH PKTL 2023 - Bimbingan dan Pengawasan Kegiatan Swakelola Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif di 12 Kabupaten -ABT PNBPKH PKTL 2023 - Pembuatan Trayek Batas dan Pengumuman Batas dan Koordinat Sementara Kawasan Hutan Perairan di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Singkil - ABT PNBPKH PKTL 2023 - Pembahasan Batas dan Koordinat Definitif Kawasan Hutan Perairan di Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Singkil - ABT PNBPKH PKTL 2023 - Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas SDM untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Utara - Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup BPKHTL untuk menunjang tugas dan fungsi - Orientasi Batas dan Rekonstruksi Batas Kawasan Taman Hutan Raya Simeulue		
--	---	--	--

	- Publikasi Penataan Batas Kawasan Hutan - Konsolidasi, Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Lapangan - Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kab. Simeulue, Aceh Barat Dayat dan Nagan Raya - Peninjauan Lokasi Untuk Usulan Pelepasan Jalan TOL Sibanceh		
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan			
1.	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor • Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor - Layanan Kajian Dampak Lingkungan di Wilayah BPKHTL - Konsultasi/Koordinasi dalam rangka Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	1 Layanan	50.000.000
2.	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL • Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan - Layanan Kajian Tata Lingkungan di Wilayah BPKHTL - Konsultasi/Koordinasi dalam rangka Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan	1 Layanan	50.000.000
3.	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan • Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Layanan	224.596.000
4.	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL • Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	1 Layanan	70.404.000

6.	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL • Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	1 Layanan	97.830.000
----	---	-----------	------------

D. Perjanjian Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Pengukuran pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja program. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis di Tahun 2023, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh menyusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja. Adapun dokumen penetapan kinerja yang mencantumkan sasaran strategis dan indikator kinerja beserta target kinerja dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023 – Revisi II

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	2	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	2	2	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	134	134	Unit
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	51	51	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	83	83	Unit

E. Review atas Dokumen Perencanaan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Berdasarkan perubahan alokasi anggaran yang terjadi, terdapat penambahan volume target pada sasaran “Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan”, yaitu elemen kegiatan / indikator kinerja Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH dan Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH serta target pada sasaran “Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan” yaitu pada elemen kegiatan / indikator kinerja Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH .

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal	Penyesuaian Target
1. Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	-	1 Layanan
	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	-	1 Layanan
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH		
	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	-	1 Klaster



KEGIATAN TEKNIS BPKHTL WILAYAH XVIII BANDA ACEH



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dilakukan Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk analisis deskriptis/uraian setiap capaian indikator dan penghitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan/target yang telah ditetapkan, yang dapat digunakan untuk menghitung capaian sasaran. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase capaian sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, dengan metode sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas \% Capaian Kinerja Ybs} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja \% Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023, telah menetapkan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai output kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dan telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas capaian target BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tidak luput dari keikutsertaan Sumber Daya Manusia BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh sendiri dan didukung oleh SDM Pihak-pihak terkait dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun rincian kegiatan tersebut, yaitu:

1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
2. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
3. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan sebanyak 1 rekomendasi.
4. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan sebanyak 1 rekomendasi.
5. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
6. Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL sebanyak 1 Layanan.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebanyak 2 Layanan Banda Aceh dengan indikator kinerja (output kegiatan). Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dapat tersajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian
1. Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	- Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
	- Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Klaster	1 Klaster	100

	- Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100
3. terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	- Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan (2.455,69 Km)	1 Rekomendasi Kebijakan (2.786Km)	113
4. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	- Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Provinsi	1 Provinsi	100
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	- Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1 Layanan	1 Layanan	100
<i>Rata-rata</i>				<i>102,6</i>

b. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dilakukan dengan membandingkan persen capaian kinerja tahun berjalan dengan persen capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya, namun terdapat beberapa kegiatan yang pada tahun sebelumnya tidak dapat terlaksanakan secara 100% tetapi ditahun berjalan kegiatan serupa dapat terlaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan angka pengukuran Efektifitas Capaian kinerja yang sangat signifikan. Rincian

pengukuran efektifitas capaian kinerja selengkapnya tersajikan pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Pengukuran Efektifitas Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2023	Efektifitas Capaian Kinerja
1. Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	- Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH - Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	100	100	1
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH - Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	100	100	1
3. terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	- Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	100	113	1,13
4. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	- Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	100	100	1
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	- Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi			

	Kehutanan dan Tata Lingkungan - Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel			
--	--	--	--	--

Efektifitas Capaian Kinerja Sasaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun sebelumnya dengan tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2023 semua Indikator kinerja yang nilai rasio Efektifitasnya mencapai 1 (satu).

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran yang dilaksanakan Tahun 2023. Hasil pengukuran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2023	% Capaian Kinerja Fisik Tahun 2023	Efisien Capaian Kinerja
1. Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	- Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH - Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	99,93	100	0,99
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi	99,81	100	0,99

	Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH - Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH			
3. terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	- Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	99,99	100	0,99
4. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	- Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	99,99	100	0,99
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	- Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	99,98	100	0,99

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMN Tahun 2020-2024. Keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan tahun 2023 akan menjadi salah satu penentu pencapaian target kumulatif lima tahun sesuai RPJMN.

Progres capaian kinerja terhadap target renstra BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh sampai dengan renstra tahun ke-4 tersajikan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Progres Capaian Renstra BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dan tugas tambahan Nawacita Presiden pada Kegiatan Prioritas Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	% Realisasi Kumulatif
				2020	2021	2022	2023	2024		
Program Planologi dan Tata Lingkungan	1. Tereleasaikannya Penetapan Kawasan Hutan	2.390	Km	27,04	617	29	2.786	-	3.459,04	144,72
	2. Tereleasaikannya Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	20	Dokumen	1	1	1	1	-	4	20
	3. Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	28	Klaster	9	3	5	1	-	18	64,28
	4. Terlayannya permohonan penggunaan KH khususnya dalam rangka ketahanan energi, pangan dan air	5	Layanan	1	1	-	-	-	2	40
	5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	80

6. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	1	Layanan	-	-	1	1	-	2	200
7. Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH	1	Layanan	-	-	-	1		1	100
8. Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	Lembaga	-	-	1	-	-	1	100

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan merupakan upaya mencapai penyiapan prakondisi pembangunan kehutanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh yang merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023.

Adapun Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 10 serta uraian Indikator Kinerja Kegiatan dibawah ini.

Tabel 10. Capaian dari kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan				Realisasi Nasional Tahun 2023	% Capaian terhadap Realisasi Nasional
		Volume Target	Volume Realisasi	%		
Program Planologi dan Tata Lingkungan	1. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100	22 Layanan	4,55
	2. Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	100	22 Layanan	4,55
	3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Klaster	1 Klaster	100	72 Klaster	1,38
	4. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan - Laporan	1 Layanan - Laporan	100	22 Laporan	4,55
	5. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	2.455 Km	2.786 Km	113	38.184,75 Km	7,29
	6. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Provinsi	1 Provinsi	100	22 Provinsi	4,55
	7. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1 Layanan (134 Unit)	1 Layanan (134 Unit)	100	-	-

Tabel 11. Analisis Komponen Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Renja 2023)	Target	Realisasi	Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan	
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	Program Eselon I	: Kualitas Lingkungan Hidup
				Kegiatan Eselon II	: Pencegahan Dampak Lingkungan
				Kegiatan	: Pencegahan Dampak Lingkungan
				Komponen Kegiatan	: Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
				Hasil yang dicapai :	
				Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,55% dan telah menunjang pencapaian program Kualitas Lingkungan Hidup.	
				Outcome :	
				Hasil kajian lingkungan hidup dapat mendukung penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program di provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan program Prioritas Nasional.	

2. Fasilitas Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2.021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan, bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan diantaranya memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan arahan tindak lanjutnya; Bimbingan teknis terkait

ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pelaksanaan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL ditargetkan pada tahun 2023 adalah pada 1 Layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

Pada akhir tahun 2023 target kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH terlaksana sesuai target. Anggaran yang terserap pada kegiatan tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 49.959.860,- (99,92 %).

Tabel 12. Analisis Komponen Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Renja 2023)	Target	Realisasi	Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan	
Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	Program Eselon I	: Kualitas LingkunganHidup
				Kegiatan Eselon II	: Pencegahan Dampak Lingkungan
				Kegiatan	: Pencegahan Dampak Lingkungan
				Komponen Kegiatan	: Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan
				Hasil yang dicapai	: Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,55% dan telah menunjang pencapaian program Kualitas Lingkungan Hidup.
				Outcome	: Hasil kajian lingkungan hidup dapat mendukung penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program di provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan program Prioritas Nasional.



3. Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA dan Dukungan Manajemen TORA

Sebagai upaya percepatan dan mendukung pelaksanaan Kegiatan TORA pada Tahun 2023, pelaksanaan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA ditargetkan pada tahun 2023 adalah Sepanjang 331 Km untuk pelaksanaan Tata Batas TORA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.230.596.000,-.

Pada akhir tahun 2023 target pelaksanaan Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA adalah 1 Layanan (331 Km), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.230.282.642,- (99,99 %).

Tabel 13. Analisis Komponen Kegiatan Dokumentasi Hasil Inventarisasi Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Renja 2023)	Target	Realisasi	Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan	
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Provinsi	1 Provinsi	Program Eselon I	: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
				Kegiatan Eselon II	: Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
				Kegiatan	: Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
				Komponen Kegiatan	: Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Obyek TORA dalam Kawasan Hutan
				Hasil yang dicapai	:
				Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,55% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.	
				Outcome	:
				Realisasi SK Biru TORA menjadi objek redistribusi lahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk legalisasi kepemilikan lahan bagi masyarakat dalam kaitannya dengan pemerataan ekonomi.	

4. Penataan batas kawasan hutan (reguler)



Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tata batas dan pemetaan kawasan hutan. Pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh ditetapkan target penataan batas kawasan hutan Reguler sepanjang 2.455 Km yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.115.864.000,-.

Pada akhir tahun 2023 target penataan batas kawasan hutan Reguler terlaksana sepanjang 2.786 Km, ini terjadi Surplus Target Output kegiatan dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 26.111.952.443,- (99,99 %).

Tabel 14. Analisis Komponen Kegiatan Panjang Batas Kawasan Hutan Yang telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Renja 2023)	Target	Realisasi	Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan	
Terselenggaranya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan (2.455,69 Km)	1 Rekomendasi Kebijakan (2.786Km)	Program Eselon I	: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
				Kegiatan Eselon II	: Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
				Kegiatan	: Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
				Komponen Kegiatan	: Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler) - Termasuk Kawasan Konservasi Perairan)
				Hasil yang dicapai	:
				Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 7,29% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.	
				Outcome	:
				Hasil tata batas kawasan hutan akan menjadi dasar bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan	

5. Terlaksananya Inventarisasi Hutan Nasional

Inventarisasi hutan Nasional adalah pengumpulan dan penyusunan data dan segala sesuatu mengenai sumberdaya hutan sebagai bahan penyusunan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna.



Data Sumber
Daya Hutan dan
Lingkungan
merupakan dasar
penting dalam
perencanaan dan
pengelolaan hutan
baik di tingkat
nasional maupun

pada tingkat unit pengelolaan. Melalui kegiatan enumerasi serta inventarisasi hutan (biofisik dan sosial budaya) ditingkat unit pengelolaan (KPH), data sumber daya hutan dan lingkungan diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak. BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh pada tahun 2023 menargetkan pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional yang terdiri dari Output Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional sebanyak 1 klaster.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional terkendala pada beberapa hal, yaitu ditemukannya titik klaster mangrove yang sebagian tutupan lahannya terbuka (tidak bervegetasi). Hal ini mengakibatkan pergeseran titik klaster sesuai jarak yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Perlu penyegaran pengetahuan pelaksanaan enumerasi hutan mangrove dalam bentuk inhouse training.

Kegiatan ini didukung oleh sumberdaya tenaga lapangan dan anggaran sebesar Rp. 70,404.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.295.380,- (99,85 %).

Pada Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional berbasis KPH target terealisasi sebanyak 1 klaster yang dilaksanakan di Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar.

Lokasi Inventarisasi Hutan Nasional (Enumerasi TSP/PSP) dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 15. Daftar Enumerasi TSP/PSP Tahun 2023

NO.	NO KLASSTER	PENUTUPAN LAHAN (Tahun 2022)	FUNGSI HUTAN (SK.580/MENLHK/SE TJEN/SET.1/12/2018)
1.	79400609	Lahan Kering Primer	hutan produksi tetap seulawah agam

Tabel 16. Analisis Komponen Kegiatan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Renja 2023)	Target	Realisasi	Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan
Tersedia dan termutakhirkan nya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Klaster	1 Klaster	Program Eselon I : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
				Kegiatan Eselon II : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
				Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
				Komponen Kegiatan : Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan
				Hasil yang dicapai :
				Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 1,38% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
				Outcome :
				Data dan informasi sumber daya hutan hasil Inventarisasi potensi sumber daya hutan digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan, dan bahan perumusan kebijakan strategis jangka panjang, jangka menengah dan operasional jangka pendek agar diperoleh kelestarian hutan.

6. Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional

Data Sumber Daya Hutan dan Lingkungan merupakan dasar penting dalam perencanaan dan pengelolaan hutan baik di tingkat nasional maupun pada tingkat unit pengelolaan. Melalui kegiatan Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional, data penutupan lahan diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak. BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh pada tahun 2023 menargetkan pelaksanaan Penafsiran Citra Resolusi sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional sebanyak 1 Lokasi.

Kegiatan ini didukung oleh sumber daya tenaga lapangan dan anggaran sebesar Rp. 97.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.626.640,- (99,79 %).

Tabel 17. Analisis Komponen Kegiatan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Renja 2023)	Target	Realisasi	Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan	
Tersedia dan termutakhirkan nya data dan informasi SDH	Data dan informasi penutupan lahan nasional di wilayah kerja BPKHTL	1 Laporan	1 Laporan	Program Eselon I	: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
				Kegiatan Eselon II	: Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
				Kegiatan	: Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
				Komponen Kegiatan	: Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional
				Hasil yang dicapai	:
				Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,55% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
				Outcome	:
				1.) Sebagai salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK (RPJMD, KLHS, dan kajian lainnya) 2.) Bahan perumusan penentuan kebijakan pembangunan sumber daya hutan (penghitungan emisi gas rumah kaca, penilaian kelayakan pemberian izin, penyusunan Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha	

TGL SURVEY	25	02	2023	KODE SAMPEL	4-2002
SURVEYOR	1. M Kurnia Nasution			LOKASI SAMPEL	
	2. Jati Waluya			PROVINSI	Aceh
	3. Rudy Sabaruddin			KAB / KOTA	Aceh Tengah
KOORDINAT LOKASI SAMPEL				KECAMATAN	Atu Lintang
LINTANG / BUJUR	4°	26'	29,04"	DESA	Merah Jernang
	96°	49'	56,23"	UP-KEHUTANAN	UPTD KPH Wilayah IV Aceh
UTM	491271			INFORMASI PENUTUPAN LAHAN	
	259450			KELAS (23)	Hutan Lahan Kering Sekunder (2002)
ELEVASI	1565			VARIASI	Semak Belukar (2007)

KARAKTERISTIK FISIK LAPANGAN

TOPOGRAFIS	☐ DATARAN	☐ BERGELOMBANG (<50m)	☒ BERBUKIT (50-300m)	☐ BERGUNUNG (>300m)
MATERIAL TANAH	☐ BATUAN INDUK	☐ KARANG	☐ PASIRAN	☒ LEMPUNGAN
DRAINASE	☐ BAIK	☒ SEDANG	☐ BURUK	
BENTUK LAHAN	☐ MARIN	☐ ALUVIAL	☐ FLUVIO-MARIN	☒ VULKANIK
KELERENGAN	☐ 0-2%	☐ 2-8%	☐ 8-16%	☐ 16-25%
				☒ 25-40%
				☐ >40%

KETERANGAN TAMBAHAN

Semak Belukar berbatasan dengan kebun kopi

CUPLIKAN CITRA
(Skala 1:50.000 disertai posisi titik sampel)

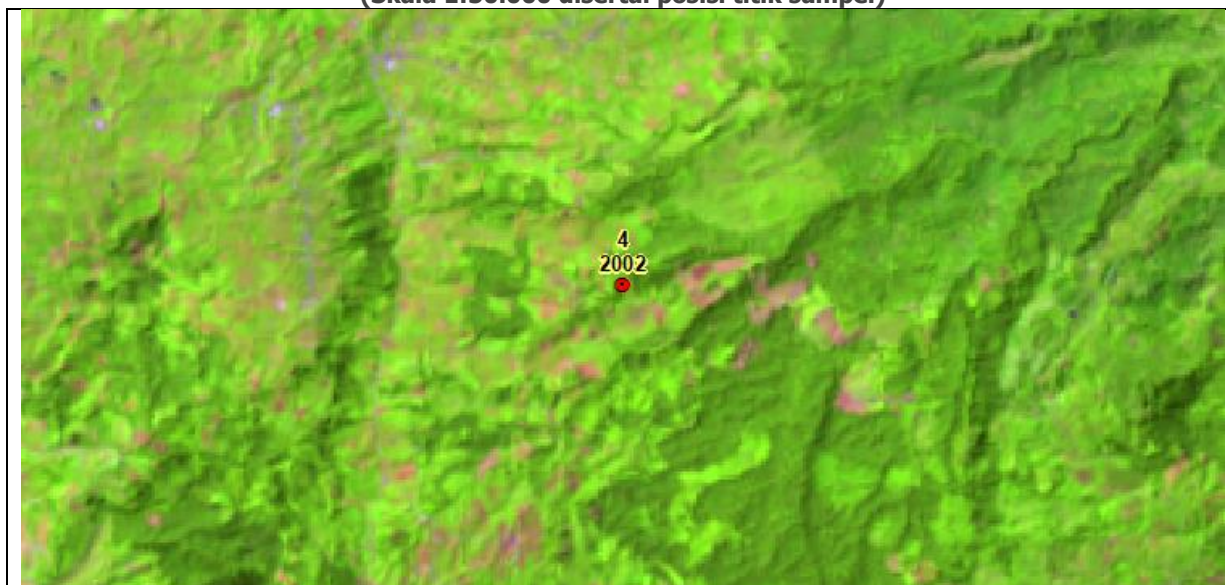


FOTO LAPANGAN KEGIATAN GROUNDCEK

UTARA



TIMUR



BARAT



SELATAN



7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sebagai upaya mendukung kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh sesuai tugas dan fungsinya turut disertakan dengan SDM yang handal dan memadai melalui pemenuhan kebutuhan pegawai melalui Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta keperluan sehari-hari perkantoran untuk menunjang kelancaran aksesibilitas kegiatan perkantoran, kegiatan pendukung operasional serta Layanan Sarana Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.112.146.000,- dan sebanyak 134 Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan realisasi sebanyak 134 Unit dan anggaran sebesar Rp. 7.110.722.245,- (99,98 %). Keberhasilan BPKHTL Wilayah XVIII dalam mengeksekusi target sasaran ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2023, antara lain pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh dalam membangun manajemen internal sesuai standar mutu dan layanan yang berkualitas, dan integritas yang kuat dalam mengimplementasikan anti suap di lingkungan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh. Selain itu, keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 ini juga didukung oleh SDM yang memadai, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Outcome dari keberhasilan capaian sasaran pada IKK ini akan meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi

B. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023 adalah Rp. 35.720.809.210,- (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah), dari pagu sebesar Rp. 35.726.840.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), selengkapnya disajikan pada Tabel 12 berikut:

Tabel 18. Realisasi Serapan Anggaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023

Indikator Kinerja	Keuangan			Fisik (%)
	DIPA	Realisasi	%	
1. Pencegahan Dampak Lingkungan	100.000.000	99.929.860	99,93	100
2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	28.346.460.000	28.342.235.085	99,99	100
3. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	168.234.000	167.922.020	99,81	100
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	7.112.146.000	7.110.722.245	99,98	100
Total	35.726.840.000	35.720.809.210	99,98	100

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2020 - 2024. Berangkat dari kondisi tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, maka BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh tahun 2023 yang merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Pengukuran kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh 2023 didasarkan atas penetapan kinerja (PK) Tahun 2023, yang penyusunannya mengacu pada sasaran/*outcome* yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024.

Pada Tahun 2023, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh menetapkan 6 (Enam) sasaran kegiatan, hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam PK menunjukkan bahwa capaian sasaran BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 mencapai 99,98 % dan capaian Kinerja kegiatan Fisik yang menjadi Sasaran kegiatan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh Tahun 2023 merupakan salah satu upaya guna meningkatkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi yang diembannya. Disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, namun diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN II)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN II)

SATUAN KERJA : 238471. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	-	-	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	-	Unit
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	2.455,69	2.455,69	Km

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	2	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik			
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	-	-	Dokumen
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	2	2	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	-	-	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	134	134	Unit

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	51	51	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	83	83	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.41.355.244.000	Rp.28.346.460.000
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp.167.830.000	Rp.168.234.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
3. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp.100.000.000	Rp.100.000.000
Program Dukungan Manajemen		
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.6.992.594.000	Rp.7.112.146.000
TOTAL ANGGARAN	Rp.48.615.668.000	Rp.35.726.840.000

Jakarta, Desember 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Kepala BPKHTL Wilayah XVIII
Banda Aceh



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 006

2023

